



KECAMATAN
KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN / LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LKPJ / LPPD)
KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP
2025**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban / Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ/LPPD) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ/LPPD dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

LKPJ/LPPD Kecamatan Kintap secara garis besar menjabarkan mengenai Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen. Kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Kintap, Januari 2025

Camat Kintap,

SUTARNO.S.Kep.Ns.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731006 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas – luasnya. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kintap disusun dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024
24. Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

1.1 DATA UMUM DAERAH

1.1.1. Data Geografis Daerah

Kecamatan Kintap adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada 115,378–115,0782⁰ Bujur Timur dan 3,56197⁰–3,947864⁰ Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jorong. Kecamatan Kintap memiliki luas 857,21 km² atau 16% dibandingkan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Kintap dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelabuhan sekitar + 70 Km, dengan jumlah Desa sebanyak 14 (empat belas) desa.

Tabel. 1.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan menurut Desa di Kecamatan Kintap

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN (%)
1	Pandan Sari	78,02	9,11
2	Salaman	105,93	12,36
3	Kintapura	66,32	7,74

4	Pasir Putih	13,37	3,04
5	Kintap Kecil	27,47	3,20
6	Kintap	26,40	3,08
7	Muara Kintap	27,68	3,23
8	Bukit Mulia	12,70	1,48
9	Sumber Jaya	13,39	1,56
10	Kebun Raya	10,38	1,21
11	Mekar Sari	11,71	1,37
12	Sebamban Baru	11,49	1,34
13	Sungai Cuka	150,04	17,50
14	Riam Adungan	302,23	35,26
	Total Luas Daerah	857,21	100,00

Sumber : Kintap dalam Angka 2024, BPS Tanah Laut

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kintap menurut Data BPS Tanah Laut, Kecamatan Kintap Dalam Angka 2024 sebanyak 44.563 jiwa. Dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.2 Jumlah Pendudukan menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan/Desa Semester I Tahun 2023 di Kecamatan Kintap

NO	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pandan Sari	2.460	2.332	4.792
2	Salaman	1.194	1.040	2.234
3	Kintapura	2.575	2.376	4.951
4	Pasir Putih	1.441	1.403	2.844
5	Kintap Kecil	1.721	1.667	6.778
6	Kintap	1.900	1.813	3.713
7	Muara Kintap	2.394	2.266	4.660
8	Bukit Mulia	1.268	1.253	2.521
9	Sumber Jaya	1.409	1.346	2.755
10	Kebun Raya	1.535	1.539	3.074
11	Mekar Sari	925	854	1.779
12	Sebamban Baru	1.036	1.041	2.077
13	Sungai Cuka	2.318	2.139	4.457
14	Riam Adungan	688	630	1.318
	JUMLAH	22.864	21.699	44.563

Sumber : Kintap dalam Angka 2024, BPS Tanah Laut

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tanah Laut periode 2010-2020 mencapai 1,85 %. Berdasarkan tren yang ada, apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kabupaten Tanah

Laut termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% bahkan kurang dari 1%.

Tabel.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Kintap

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN 2010-2020
1	2	3	4
1	Pandan Sari	3.635	1,52
2	Salaman	1.464	1,63
3	Kintapura	1.730	1,83
4	Pasir Putih	1.176	1,63
5	Kintap Kecil	6.836	2,64
6	Kintap	2.572	1,60
7	Muara Kintap	3.374	2,26
8	Bukit Mulia	12.957	0,90
9	Sumber Jaya	11.160	0,69
10	Kebun Raya	10.572	3,73
11	Mekar Sari	2.794	2,40
12	Sebamban Baru	635	4,13
13	Sungai Cuka	1.035	1,06
14	Riam Adungan	797	1,47
	JUMLAH	78.793	1,85

Sumber : Kecamatan Kintap dalam Angka 2024

Tabel.1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Kintap

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PERSentase PENDUDUK	KEPADATANPENDUDUK (per km ²) ⁴	RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK
1	2	3	4	5
1	Pandan Sari	10,75	61	105
2	Salaman	5,01	21	115
3	Kintapura	11,11	75	108
4	Pasir Putih	6,38	213	103
5	Kintap Kecil	7,60	123	103
6	Kintap	8,33	141	105
7	Muara Kintap	10,46	168	106
8	Bukit Mulia	5,66	199	101
9	Sumber Jaya	6,18	206	105
10	Kebun Raya	6,90	296	100
11	Mekar Sari	3,99	152	108
12	Sebamban Baru	4,66	181	100
13	Sungai Cuka	10,00	30	108
14	Riam Adungan	2,96	4	109
	JUMLAH	100,00	52	105

Sumber : Kecamatan Kintap dalam Angka 2024

1.1.2 Jumlah ASN

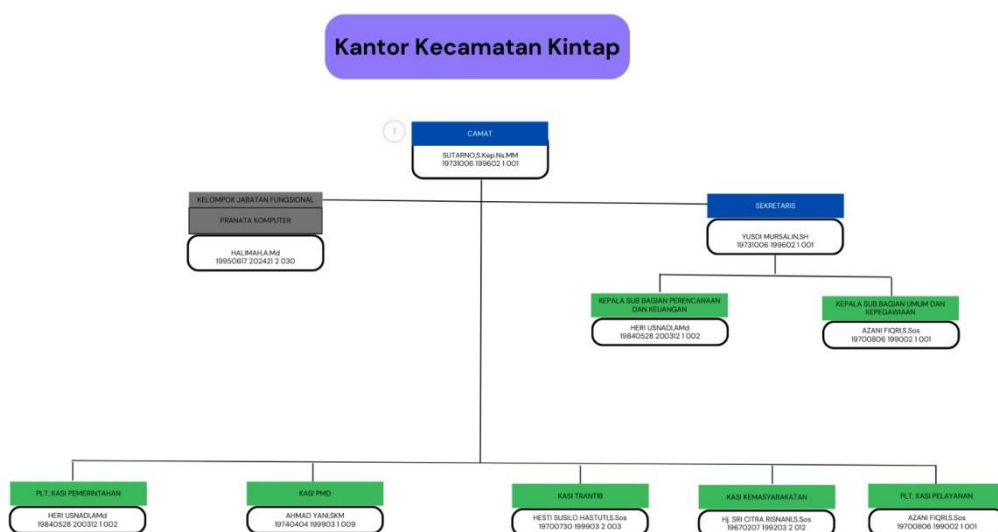
Struktur organisasi Kecamatan Kintap disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1.1.2.1 Camat

- 1.1.2.2 Sekretaris Camat
- 1.1.2.3 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- 1.1.2.4 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 1.1.2.5 Kasi Tata Pemerintahan
- 1.1.2.6 Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- 1.1.2.7 Kasi Kemasyarakatan
- 1.1.2.8 Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- 1.1.2.9 Kasi Pelayanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KINTAP



Sumber daya manusia di Kecamatan Kintap Tahun 2024 berjumlah 12 orang ASN dan 9 orang Non ASN.

Jumlah ASN Kecamatan Kintap dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Pelaihari pada

2024 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.5. Pegawai Kecamatan Kintap Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	0
2	Penata Tingkat I	III/d	5
3	Penata	III/c	0
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	0
5	Penata Muda	III/a	1
6	Pengatur Tingkat I	II/d	0
7	Pengatur	II/c	2
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
9	PPPK	VII	1
	Jumlah		12

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap 2024

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.6 ASN Kecamatan Kintap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	2
2.	S1	8
3.	D3	4
4.	SMA	3
	Jumlah	17

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap 2024

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 1.7 Pegawai Kecamatan Kintap Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
	Jumlah	9

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap 2024

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 1.8 Pegawai Kecamatan Kintap Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2024

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	4
	Jumlah	6

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap 2024

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Aset atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan di

Kecamatan Kintap terdiri dari:

1). Tanah

Tabel 1.9 Daftar Tanah Kecamatan Kintap

No	Uraian	Jumlah	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Kantor Kec. Kintap	1	74.953.604,74	Kecamatan Kintap
	Jumlah	1	74.953.604,74	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Kintap Tahun 2024

2). Gedung dan Bangunan

Tabel 1.10 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Kintap

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rp.100.650.000	Gedung Sekretariat
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rp.3.201.866.000	Gedung Kantor Kecamatan Kintap (Mutasi DPUPRP)
3	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	Rp. 16.919.000	
4	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	Rp. 269.400.000	Halaman Gedung Kantor
5	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	Rp. 195.701.000	Paving Blok Halaman Kecamatan Kintap (Mutasi DPUPRP)
6	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1	Rp. 296.511.500	Rumdin Camat (2006)
7	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen	1	Rp. 98.510.000	Pembangunan rumah dinas
8	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	Rp. 127.129.000	Rumah Penjaga Malam
9	Pagar Permanen	1	Rp 99.866.500	Pagar Halaman
	Jumlah	9	Rp 4.406.553.000	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Kintap Tahun 2024

3). Peralatan dan Mesin

a. Transportasi roda 4 dalam rangka operasional Camat

Mobil operasional digunakan untuk keperluan dinas Camat dalam perencanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan. Namundemikian, jumlah ini dirasakan masih kurang, sehingga sering terjadi penundaan kegiatan khususnya kegiatan dalam hal monitoring ke Desa/Kelurahan karena menunggu kendaraan yang dipakai secara bergantian.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan kerja aparatur Kecamatan Kintap telah pula tersedia peralatan kerja. Peralatan hasil inventarisasi BMD tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 1.11 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Kintap

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	2	2		
2.	Jeep (Toyota Rush Mobil Dinas Camat)	1	1		
3.	Mini bus	1	1		
4.	Sepeda motor	5	5		
5.	Global positioning system	1	1		
6.	Lemari kayu	7			
7.	Filing cabinet besi	5	5		
8.	Brandkas	1	1		
9.	Lemari makan	1	2		
10.	Alat penyimpanan kantor lainnya	1	2		
11.	Meja kerja kayu	7	7		
12.	Meja rapat	10	10		
13.	Kursi tamu	4	4		
14.	Kursi putar	10	10		
15.	Bangku tunggu	10	8	2	
16.	Meja komputer	4	4		
17.	Sofa	4	4		
18.	Mesin pemotong rumput	1	1		
19.	Lemari es	5	5		
20.	AC split	12	9	3	
21.	Kipas angin	6	6		
22.	Kitchen set	2	2		
23.	Treng air/tandon air	1	1		
24.	Televisi	3	3		
25.	Loudspeaker	2	2		
26.	Sound system	1	1		
27.	Tiang bendera	1	1		
28.	Dispenser	1	1		
29.	Alat pemadam/portable	1	1		
30.	Audio mixing stationer	1	1		
31.	Microphone/boom stand	2	2		
32.	Power amplifier	1	1		
33.	Camera electronic	1			
34.	Layar film/projector	3	3		
35.	Handy talky HT	4	4		
36.	Peralatan penerima lainnya	1	1		
37.	Genset	2	2		
38.	P.C Unit	6	6		
39.	Lap top	6	6		
40.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	8	1	
41.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
42.	External/ Portable Hardisk	1	1		
43.	Tenda	2	2		
	Total	150 unit	146	4	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Kintap Tahun 2024

BAB II

ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Strategi disusun dengan melihat potensi yang dimiliki baik potensi internal maupun eksternal yang mengacu pada kekuatan dan pemanfaatan peluang yang ada serta mempertimbangkan kelemahan dan ancaman organisasi. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan leading Sektor.
4. Menciptakan Good Governance.

Untuk melihat rencana strategis dapat berjalan maka disusun suatu kebijakan arah pembangunan dalam menjabarkan program dan kegiatan yang disusun yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas pelimpahan dari Kepala Daerah.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparat akan tugas-tugas pokok.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Keahlian aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.
4. Meningkatkan Pemahaman akan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa, BPD.
5. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya
6. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Desa.

B. PRIORITAS SKPD DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI DAERAH

Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang baik dengan meningkatkan koordinasi internal dan Eksternal". Pelaksanaan program pembangunan prioritas Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut adalah keterkaitan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi ini kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Prioritas yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut adalah Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan Daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Tanah laut, maka pemerintah Kabupaten berusaha terus menggali segala potensi dan sumber sumber pendapatan untuk terus dikembangkan, dengan melalui kebijakan antara lain dengan mengintensifkan pendapatan dan mengekstensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber/potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.

Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah apabila didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah sendiri sesuai dengan Visi dan Misi yang di emban.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 0,- hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan Sesuai ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa penerbitan PBG (sebelumnya di sebut IMB) dilakukan oleh DPMPSTP sehingga Kecamatan Kintap tidak lagi melakukan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas pengguna anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menunjukkan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Uraian Belanja Daerah Kecamatan Kintap TA. 2023 dan TA. 2024

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2023	2024
1.	PENDAPATAN	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	BELANJA	Rp. 5.153.221.422,-	Rp. 4.123.438.360,-
	BELANJA OPERASI	Rp. 5.153.221.422,-	Rp. 3.977.207.500,-
	Belanja Pegawai	Rp. 2.072.920.647,-	Rp. 2.408.919.259,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.237.720.775,-	Rp. 1.066.288.241,-
	Belanja Hibah	Rp. 842.580.000,-	Rp. 502.000.000,-
	BELANJA MODAL	Rp. 87.264.588,-	Rp. 146.230.860,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 80.564.588,-	Rp. 146.230.860,-
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 6.700.000,-	Rp. 0,-

Sumber : SIPD AKLAP per 31 Desember

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEN

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEN URUSAN WAJIB

Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 4 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.

Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Kintap tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Sinkronisasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Target dari program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, baik melalui Rencana kerja (Renja) maupun RKA tahun anggaran 2024 baik itu RKA murni maupun RKA Perubahan, sebagai acuan target yang hendak dicapai oleh Kecamatan Kintap pada tahun anggaran 2024. Target pada Renja maupun RKA yang selanjutnya di tuangkan dalam DPA dan DPAP SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Realisasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kecamatan K Tahun Anggaran 2024 adalah :

Tabel 4.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kintap TA. 2024

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			93,18 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %

2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang/bulan	12	Orang/bulan	100 %
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		19 Dokumen		19 Dokumen	100%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	Paket	12	Paket	100 %
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Paket	2	Paket	100 %
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	4	Paket	100 %
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	2	Paket	2	Paket	100 %
4.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100 %
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah					84,44%

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	8 Unit	88,88 %	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	12 Unit	80%	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100 %	
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	6 unit	100 %	

7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22	unit	22	unit	100 %
7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	100 %
II.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100 %
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					100 %
8.1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	17	Orang	17	Orang	100 %

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
8.2	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000	Orang	2000	Orang	100 %
8.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	Dokumen	8	Dokumen	100 %
III.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100 %
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100 %
9.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	Dokumen	24	Dokumen	100 %
9.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %

IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %
10.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %
10.1	Sub Kegiatan Sinkronisasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Rata- rata		-	98,29 %

Sumber : SIPD AKLAP TA.2024 Kecamatan Kintap

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Kintap pada tahun anggaran 2024 capaian realisasi kinerja seluruh program mencapai rata – rata 98,29 % sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum di DPA perubahan.

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Tahun 2024 dan APBD Perubahan 2024 dalam hal ini Belanja Operasi, Kecamatan Kintap memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp 4.123.438.360 dan terealisasikan sebesar Rp 3.538.187.729 Capaian Belanja Operasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5
I.	BELANJA OPERASI	Rp.4.123.438.360	Rp. 3.538.187.729	85,81

1	Belanja Pegawai	Rp.2.408.919.259	Rp. 1.920.057.928	79,71
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.066.288.241	Rp.999.832.328	93,76
3	Belanja Hibah	Rp. 502.000.000	Rp. 502.000.000	100
4	Belanja Modal	Rp. 146.230.860	Rp. 116.297.473	79,53
Jumlah		Rp.4.123.438.360	Rp. 3.538.187.729	85,81

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2024

Belanja Operasi merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan belanja barang dan jasa serta belanja hibah dan Belanja Modal. Total untuk anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 Rp.1.066.288.241, sedangkan untuk anggaran Hibah Rp. 502.000.000 dan untuk anggaran Belanja Modal Rp. 146.230.860. Dari jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa tersebut terealisasi sebesar Rp. 999.832.328 atau 93,76% sedangkan belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 502.000.000 atau 100% dan untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 116.297.473 atau 79,53%. Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Kecamatan Kintap tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Kintap TA.2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.473.092	6.367.200	98,36 %
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674	3.341.600	96,14 %
			Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.919.259	1.920.057.928	79,70 %
				Pelaksanaan Penatausahaan	3.470.059	3.318.000	95,61 %

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
				n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			
			Administrasi Kepegawian Perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000	7.909.000	91,34 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303	5.343.340	88,29 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.453.007	28.839.660	88,86 %	
		Penyediaan Bahan/Material		20.000.000	20.000.000	100%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		277.120.000	270.817.081	97,72 %	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	4.890.491	4.171.603	85,30 %	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.569.859	54.545.000	94,74 %	
			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	83.770.510	57.580.870	68,73 %	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	46.220.453	40.531.414	87,69 %	
			Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.899.732	231.105.008	99,22 %	
		Pemeliharaan	Penyediaan	37.000.000		99,92 %	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		36.971.800	%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	47.500.000	47.088.475	99,13 %
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000	10.450.000	90,08 %
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086	3.125.000	93,98 %
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.638.000	23.715.000	92,49 %
		Program Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	99.172.460	80.969.000	81,64 %

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Pemerintahan Umum	Penugasan Kepala Daerah	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	648.676.375	633.980.750	97,73 %
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	40.600.000	30.635.000	75,45 %
		Program Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	12.880.000	12.600.000	97,82 %

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		n Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendayagunaan Aset Daerah			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.075.000	4.725.000	93,10 %

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2024

a. Permasalahan dan Solusi.

Kecamatan Kintap dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai disebabkan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sementara kendala yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang kurang berkompeten untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat melakukan pelatihan / bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun tenaga honorer.
2. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi aparatur Desa oleh instansi terkait.
3. Terdapat kendala dalam proses pengadaan melalui aplikasi.

Adapun solusi terkait kendala tersebut:

1. Telah diusulkan permohonan untuk pelatihan/bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun Tenaga Honorer.
2. Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur desa oleh instansi terkait.

3. Telah melakukan pengadaan melalui Aplikasi sosialita.

URUSAN PILIHAN

Untuk Kecamatan Kintap tidak menyelenggarakan urusan Pilihan/Kegiatan yang dimaksud

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah

- a. Dasar Hukum
- b. Instansi Pemberi Tugas pembantuan
- c. Program, Kegiatan Dan Pelaksanaannya
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- e. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- f. Permasalahan Dan Solusi

Kecamatan Kintap tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

2. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Provinsi

- a. Dasar Hukum
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- e. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- f. Permasalahan Dan Solusi

Kecamatan Kintap tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

3. Tugas Pembantuan Kepada Desa

- a. Dasar Hukum
- b. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas pembantuankan
- c. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- e. Permasalahan dan Solusi

Kecamatan Kintap tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud

BAB VI

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

SKPD Kecamatan Kintap yang merupakan unsur kewilayahantidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

BAB VII

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari total pagu anggaran Kecamatan Kintap sebesar Rp 4.123.438.360,- (Empat Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.538.187.729,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 85,81%

5.2 KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kecamatan Kintap yaitu :Kecamatan Kintap menjadi Juara II Pawai MTQN Tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Jorong dan juara 7 secara umum. Serta juara ke-III dalam acara Lomba Masak Menu Serba Ikan Tingkat Kabupaten Tanah Laut

Demikian laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Kintap ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut.

Camat Kintap


SUTARNO, S.Kep.Ns.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731006 199602 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.872.815.015,00	3.291.396.525,00	100,00%	3.291.396.525,00	99,93%	2.751.562.979,00	83,60
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.948.766	9.948.766	100,00%	9.948.766	100,00%	9.708.800,00	97,59
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.473.092	6.473.092	100,00%	6.473.092	100,00%	6.367.200,00	98,36
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674	3.475.674	100,00%	3.475.674	100,00%	3.341.600,00	96,14
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.142.389.318,00	2.412.389.318,00	100,00%	2.412.389.318,00	100,00%	1.923.375.928,00	79,73
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.259,00	2.408.919.259,00	100,00%	2.408.919.259,00	100,00%	1.920.057.928,00	79,71
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.470.059,00	3.470.059,00	100,00%	3.470.059,00	100,00%	3.318.000,00	95,62
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%	8.658.000,00	100,00%	7.909.000,00	91,35
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%	8.658.000,00	100,00%	7.909.000,00	91,35
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.824.310,00	335.624.310,00	100,00%	335.624.310,00	98,27%	420.022.456,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303,00	6.051.303,00	100,00%	7.262.410,00	100,00%	6.534.500,00	89,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.453.007,00	32.453.007,00	100,00%	152.254.824,00	100,00%	134.211.068,00	88,15%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	9.967.440,00	100,00%	8.905.000,00	89,34%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.320.000,00	277.120.000,00	100,00%	235.000.000,00	96,70%	233.984.443,00	99,57%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.230.860,00	116.297.473,00	100,00%	116.297.473,00	100,00%	116.297.473,00	79,53%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.890.491,00	4.890.491,00	100,00%	4.890.491,00	100,00%	4.171.603,00	85,30%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.558.859,00	57.569.859,00	100,00%	57.569.859,00	100,00%	54.545.000,00	94,75%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.120.185,00	279.120.185,00	100,00%	279.120.185,00	100,00%	271.636.422,00	97,32%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.220.453,00	46.220.453,00	100,00%	46.220.453,00	100,00%	40.531.414,00	87,69%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.899.732,00	232.899.732,00	100,00%	232.899.732,00	100,00%	231.105.008,00	99,23%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.425.086,00	99.425.086,00	100,00%	99.425.086,00	100,00%	97.635.275,00	98,20%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00%	37.000.000,00	100,00%	36.971.800,00	99,92%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00%	47.500.000,00	100,00%	47.088.475,00	99,13%

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00%	11.600.000,00	100,00%	10.450.000,00	90,09%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086,00	3.325.086,00	100,00%	3.325.086,00	100,00%	3.125.000,00	93,98%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	25.638.000,00	100,00%	25.638.000,00	100,00%	23.715.000,00	92,50%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	25.638.000,00	100,00%	25.638.000,00	100,00%	23.715.000,00	92,50%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	25.638.000,00	100,00%	25.638.000,00	100,00%	23.715.000,00	92,50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	799.776.375,00	689.276.375,00	100,00%	689.276.375,00	100,00%	745.584.750,00	94,56%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	799.776.375,00	689.276.375,00	100,00%	689.276.375,00	100,00%	745.584.750,00	94,56%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	759.176.375,00	648.676.375,00	100,00%	648.676.375,00	100,00%	633.980.750,00	97,73%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00%	40.600.000,00	100,00%	30.635.000,00	75,46%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.080.000,00	17.955.000,00	100,00%	17.955.000,00	100,00%	17.325.000,00	96,49%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.080.000,00	17.955.000,00	100,00%	17.955.000,00	100,00%	17.325.000,00	96,49%

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.880.000,00	12.880.000,00	100,00%	12.880.000,00	100,00%	12.600.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.200.000,00	5.075.000,00	100,00%	5.075.000,00	100,00%	4.725.000,00	93,10%
		3.813.529.466	4.123.438.360	100,00%	4.123.438.360	99,93%	3.538.187.729	85,81%

Lampiran 2. Juara Lomba Masak Menu Serba Ikan Tingkat Kabupaten



Lampiran 3. Juara 2 Pawai MTQN se Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Jorong



Dengan Al Qur'an, Kita Bangun
Keyakinan Agama Yang Kuat dan Teguh

Kafilah
KEMAJLISAN KONTAK

KAFILAH
KEMAJLISAN KONTAK



